

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian**

Guru merupakan salah satu elemen penting dalam dunia pendidikan, mereka tidak hanya berperan memberikan pengajaran pada siswa tetapi juga menunjukkan kiprahnya yang lebih makro. Salah satu kiprah tersebut adalah turut serta dalam organisasi profesi sebagai sebuah organisasi yang mewadahi aspirasi guru. Lewat organisasi profesi tersebut guru dapat meningkatkan kompetensi, mengadukan permasalahan yang berkaitan dengan keprofesian, perlindungan hukum, bahkan mereka dapat menjadi pemerhati kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan pendidikan (Surakhmad, 2009: 246).

Organisasi profesi adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota serta melindungi hak dan kewajiban anggota profesi tersebut. Keanggotaannya terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi sama, profesi merupakan pekerjaan yang menuntut keahlian tertentu dan diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Lewat organisasi profesi ini diharapkan anggotanya memiliki kemampuan profesional, yaitu kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tuntutan profesi yang dimilikinya. Pengertian tersebut seperti diungkapkan oleh Tilaar sebagai berikut.

“Organisasi profesi adalah organisasi dari para profesional dalam suatu profesi tertentu. Organisasi profesi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya dalam bidang profesinya, serta melindungi hak dan kewajiban anggota profesi tersebut” (Tilaar, 2002: 87).

Berdasarkan pengertian organisasi profesi yang diungkapkan oleh Tilaar tersebut, maka ditemukan beberapa poin penting mengenai definisi organisasi profesi guru. *Pertama*, organisasi tersebut beranggotakan orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan memiliki keahlian dalam bidang pendidikan. *Kedua*, organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru sebagai seorang pendidik. *Ketiga* Organisasi berfungsi untuk melindungi hak dan kewajiban guru, dalam hal ini organisasi profesi guru menjadi sebuah tempat perlindungan hukum bagi guru yang menjadi anggota organisasi tersebut .

Organisasi profesi memberikan berbagai macam manfaat bagi guru diantaranya kesempatan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan mutu pembelajaran meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Selain itu organisasi profesi juga merupakan suatu kekuatan yang dapat memberikan sumbangan besar bagi pendidikan, sehingga mereka dapat dilibatkan dalam perumusan kebijakan pemerintah. Lewat kesempatan inilah organisasi profesi guru memiliki kapasitas sebagai wadah dalam menyalurkan aspirasi, pengaduan permasalahan yang dihadapi guru, bahkan sebagai sarana untuk mengkritik kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan guru (Danim, 2010: 71).

Memperhatikan betapa pentingnya peranan organisasi profesi guru tersebut, maka dari waktu ke waktu guru terus memanfaatkannya sebagai alat untuk melakukan gerakan memperjuangkan hak guru. Gerakan selalu diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk memberikan respon atau reaksi atas kondisi tertentu demi mencapai tujuan tertentu. Bentuk gerakan dilakukan dengan berbagai cara, baik lewat pernyataan-pernyataan sikap atau gerakan yang lebih

radikal berupa demonstrasi. Pada akhirnya pola gerakan organisasi profesi guru ini terus mengalami dinamika tersendiri sesuai dengan kondisi zaman yang sedang terjadi (Mahardika, 2000: 3).

Gerakan organisasi guru di Indonesia dalam sejarahnya mengalami dinamika naik turun dari masa ke masa. Sejak pendudukan pemerintahan Hindia-Belanda organisasi guru mulai muncul dengan nama PGHB yang didirikan oleh Dwidjosewojo seorang anggota pengurus besar Budi Oetomo pada tahun 1911 yang diresmikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1912. Perkembangan berikutnya PGHB berganti nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) pada tahun 1933 dan mengalami kemandegan pada zaman pendudukan Jepang. Baru pada masa kemerdekaan organisasi guru muncul kembali, tepatnya pada tanggal 25 November 1945 dibentuk Persatuan Guru Republik Indonesia atau dikenal dengan nama PGRI (Pringgodigdo, 1984: 159).

Pada era Orde Baru terjadi perubahan mendasar pada organisasi guru yang memiliki implikasi pada posisi guru. Pada tanggal 9 Agustus 1976 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1976 tentang “Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya”. Peraturan tersebut mencantumkan kedudukan dan tugas pegawai negeri sipil dalam pemerintahan sangat penting, oleh karena itu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang keanggotaan pegawai negeri sipil dalam partai politik atau Golongan Karya. Adapun pegawai negeri sipil yang dimaksud dalam peraturan tersebut meliputi pegawai badan usaha milik negara, kepala desa, pejabat negara, dan abdi negara juga abdi masyarakat (Badan Administrasi Kepegawaian Negara, 1976: 67).

PP No. 20 Tahun 1976 menjelaskan mengenai konsep abdi negara dan abdi masyarakat dalam arti luas, yaitu sebagai orang yang hidup ditengah-tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Ruang lingkupnya meliputi setiap orang yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dibawah naungan pemerintah dan bekerja untuk mengabdikan pada masyarakat, termasuk guru dan organisasi profesi yang menaunginya. Melalui PP tersebut pemerintah mengatur mekanisme keanggotaan guru sebagai pegawai negeri sipil dalam partai politik dan golongan karya. Namun dalam prakteknya secara tidak langsung kondisi ini menjadi sebuah indoktrinasi untuk mengarahkan sikap politik guru dan organisasi profesi yang menaunginya, seperti diungkapkan Dharmaningtyas (2005: 154) sebagai berikut.

“Pada masa orde baru itu, terjadi perubahan mendasar pada organisasi guru yang memiliki implikasi pada posisi politik guru. Bersamaan dengan bentuk organisasi, yaitu serikat pekerja menjadi organisasi profesi, itu pula PGRI menjadi bagian dari mesin politik Orde Baru yang dimainkan oleh Golkar”.

Dinamika cukup besar berkaitan dengan organisasi guru terjadi pada era reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Reformasi memunculkan euforia baru dalam menggemakan kebebasan dan mengupayakan demokrasi setelah kehidupan masyarakat Indonesia terkungkung selama orde baru. Masyarakat menuntut adanya kebebasan berbicara, berpendapat, berkumpul, bahkan menuntut adanya kontrol terhadap pemerintah. Euforia muncul seperti bom waktu dan meledak tepat pada waktunya saat mereka ingin menumbangkan Soeharto dari kepemimpinannya sebagai Presiden Indonesia selama 32 tahun. Bersamaan dengan tumbanganya Soeharto sebagai presiden muncul tuntutan-tuntutan

perombakan birokrasi yang sudah berkuasa selama masa orde baru, pembaharuan lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, termasuk keberadaan organisasi profesi guru.

Sejak awal berdirinya sampai masa Orde Baru berakhir, PGRI menjadi organisasi profesi keguruan satu-satunya di Indonesia. Sentralisasi kekuasaan yang dilakukan pemerintah orde baru salah satunya diwujudkan dengan pemberlakuan mono-organisasi guru. Kebijakan tersebut bertujuan agar guru bisa terorganisir dalam sebuah naungan dan dapat terkontrol dengan mudah tanpa adanya perpecahan. PGRI menjadi sebuah organisasi guru raksasa yang berfungsi untuk menaungi aspirasi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru. Selain itu PGRI turut berperan serta dalam memberdayakan pendidikan Indonesia lewat program kerja yang disusun dalam setiap kongres (Yunus dkk, 2003: 52).

Periode reformasi memberikan nuansa baru dalam tatanan struktur organisasi keguruan, iklim demokrasi yang semakin terbuka memberikan kebebasan bagi setiap guru untuk berserikat dan menyatakan pendapat. Setiap guru bebas menyatakan kehendaknya untuk mengikuti organisasi yang dipandang lebih memperjuangkan nasibnya. Pengembangan demokratisasi tersebut membuka peluang tumbuhnya organisasi-organisasi guru independen yang ada di setiap daerah. Selain itu muncul ketidakpuasan guru terhadap organisasi guru yang telah ada, organisasi tersebut dianggap kurang mewakili aspirasi mereka sehingga mereka berani untuk keluar dan membentuk organisasi baru.

Pada tahun 2000 Depdiknas melakukan survey bertema “Perlindungan Hukum Tenaga kependidikan” dalam rangka menyusun undang-undang perlindungan guru. Survei dilakukan di 14 Provinsi dengan sampel 250 responden (guru) secara acak dari SD, SLTP, SMU, dan SMK dengan hasil yang cukup mencengangkan tentang efektivitas organisasi PGRI dalam memperjuangkan aspirasi anggotanya. Sebanyak 59,2% guru menjawab PGRI belum ada manfaatnya, 27,2% ada manfaatnya, 9,2% tidak bermanfaat sama sekali, 4,4% tidak menjawab. Selanjutnya 31,6% guru menjawab PGRI tidak mampu memperjuangkan kesejahteraan guru, 14,4% tidak mampu menampung aspirasi guru, dan 16% tidak mampu memberi perlindungan hukum (Media Indonesia, Jum’at 14 April 2000: 9).

Hasil survey yang dilakukan oleh Depdiknas memberikan gambaran fakta yang cukup signifikan, ternyata guru memiliki ketidakpuasan terhadap organisasi profesi yang telah menaunginya. Mereka merasakan belum ada manfaat dari keberadaan PGRI baik dalam memperjuangkan kesejahteraan guru maupun perlindungan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi. Survey ini menjadi salah satu fakta yang menunjukkan faktor-faktor penyebab munculnya organisasi guru diluar PGRI. Guru menunjukkan ketidakpuasannya dengan membentuk organisasi baru yang dianggap lebih memperjuangkan aspirasi, kesejahteraan, perlindungan hukum, dan pengembangan profesi mereka.

Asas kebebasan yang muncul pada era reformasi dan ketidakpuasan guru terhadap PGRI inilah yang kemudian mendorong munculnya organisasi-organisasi guru diluar PGRI, salah satunya Federasi Guru Independen Indonesia

(FGII). FGII muncul sebagai gabungan organisasi-organisasi guru di berbagai daerah yang diprakarsai sejak akhir tahun 1999. Organisasi-organisasi tersebut adalah LAP (Lembaga Advokasi Pendidikan) Jakarta, FGHI (Forum Guru Honorer Indonesia), FAGI (Forum Aksi Guru Indonesia) Bandung, PGT (Persatuan Guru Tanggerang), IGHI (Ikatan Guru Honorer Indonesia), FOGGAR (Forum Guru Garut), PGTTI, PGNPRI Tanggerang, PKG Tanggerang, FKPOP Lebak, FIGURMAS (Forum Guru Nasional), dan FMGI (Forum Martabat Guru Indonesia) Lampung. Seluruh organisasi daerah yang sepakat untuk membentuk FGII ini tercantum dalam berita acara deklarasi Federasi Guru Independen Indonesia (Tim Konsolidasi Deklarasi FGII, 2002: 1-2).

Setelah melakukan gerakannya secara sendiri-sendiri, organisasi guru di daerah-daerah tersebut mulai memiliki kesadaran untuk bersatu dalam sebuah organisasi besar. Hal tersebut mulai terwujud dengan terjadinya pertemuan antar organisasi guru di Jakarta pada tahun 2000 dalam sebuah diskusi publik yang diadakan oleh LAP (Lembaga Advokasi Pendidikan). Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang keinginan bersama untuk mendirikan organisasi guru yang bersifat nasional. Proses pembentukan organisasi guru yang bersifat nasional tersebut dilakukan sampai akhirnya terwujud pada 17 Januari 2002 dengan dideklarasikannya FGII di tugu proklamasi Jakarta.

Penelitian mengenai pembentukan FGII sangat menarik dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang muncul khususnya berkaitan dengan dinamika gerakan guru di Indonesia. Sebagai satu-satunya organisasi guru yang telah ada sejak dulu dan dilegalkan oleh pemerintah, PGRI menjadi sebuah

organisasi tunggal yang menaungi guru dalam satu payung bersama. Kemunculan FGII sebagai organisasi guru diluar PGRI menjadi sebuah dinamika unik dalam perkembangan gerakan organisasi guru di Indonesia. Ditengah harapan agar guru bersatu dalam satu payung bersama, namun ternyata muncul organisasi-organisasi guru diluar organisasi yang telah ada sebelumnya. Terdapat sebuah kekhawatiran jika organisasi-organisasi tersebut seolah berlomba dan bersaing dalam memperlihatkan kinerjanya di jalan yang bersebrangan, padahal seharusnya mereka dapat bersinergi agar menjadi sebuah kekuatan yang mampu mewisadahi aspirasi guru dan memajukan pendidikan nasional. Hal ini senada seperti yang diungkapkan oleh Rizali dkk (2009: 5).

“Guru memang harus bersinergi dan bekerja bahu membahu dalam memecahkan masalah pendidikan, bukan saling bersaing ataupun curiga mencurigai. Sudah saatnya bangsa kita mengerahkan seluruh energinya untuk memecahkan masalah bersama dan meninggalkan sikap yang saling mencurigai tersebut yang sangat menguras energi (Rizali dkk, 2009: 5)”.

Kondisi ideal mengharapakan guru dapat bersinergi dengan baik agar mampu memecahkan permasalahan pendidikan yang tengah dihadapi. Namun kenyataannya terdapat fakta yang tidak sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan, guru membentuk organisasi profesi masing-masing. Pembentukan organisasi guru independen diluar organisasi yang telah ada merupakan sebuah ekspresi dari ketidakpuasan guru dan keinginan mereka untuk menemukan organisasi yang dianggap bisa memenuhi aspirasi mereka. Disisi lain kondisi ini menjadi sebuah cerminan adanya perpecahan di kalangan guru, oleh karena itu perlu diteliti lebih seksama akan kesenjangan yang terjadi.

Beberapa alasan penulis meneliti dinamika pembentukan FGII sebagai organisasi guru. *Pertama*, kemunculan FGII ini menjadi sebuah fenomena menarik untuk mengkaji penurunan kepercayaan guru terhadap organisasi guru yang telah bertahan lama pada era sebelumnya. PGRI menjadi sebuah organisasi yang telah berdiri sejak lama, sehingga kemunculan organisasi guru diluar PGRI menjadi sebuah fenomena yang perlu dikaji lebih mendalam. Ketidakpuasan guru terhadap PGRI seperti yang dikemukakan dari hasil survey Depdiknas tahun 2000 perlu ditelaah secara seksama dari berbagai sudut pandang. Salah satu cara untuk menelaah yaitu dengan melihat latar belakang berdirinya organisasi guru diluar PGRI dan kebijakan pendidikan pada era tersebut.

*Kedua*, perkembangan organisasi FGII pasti mengalami naik turun baik dari segi keorganisasian maupun aktifitas gerakannya. Perkembangan FGII sejak momentum reformasi tahun 1998 sampai tahun 2008 memberikan sebuah gambaran mengenai gerakan organisasi guru di Indonesia. Perkembangan tersebut menunjukkan pola gerakan yang dilakukan oleh guru melalui organisasi profesi yang menaunginya. Selain itu akan ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh guru pada periode 1998-2008 beserta dengan faktor pendukung dan penghambat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal ini akan terlihat mengenai upaya organisasi-organisasi guru dalam bersinergi melakukan gerakan dan bersatu dalam naungan FGII.

*Ketiga*, terdapat pertanyaan besar mengenai seberapa besar pengaruh FGII sebagai organisasi baru yang dipercaya oleh guru-guru. Perlu dilihat kiprah dan peranannya dalam dunia pendidikan khususnya kontribusi organisasi ini terhadap

aspirasi guru. Perlu dikaji alasan mengapa organisasi-organisasi guru di daerah sepakat untuk membentuk FGII khususnya dilihat dari tingkat kepentingan, ide dasar, tujuan, dan peranannya. Selain itu perlu dikaji dinamika dalam proses pembentukan dan gerakannya, pasti ditemukan konflik-konflik baik dari pihak intern maupun ekstern sekaligus hambatan-hambatan yang dihadapi oleh FGII.

*Keempat*, secara pribadi penulis memiliki ketertarikan khusus untuk mengkaji sejarah guru salah satunya mengkaji tentang perkembangan FGII sebagai organisasi profesi guru. Penulis merasa berkepentingan untuk melakukan penelitian ini, karena selain sebagai seorang akademisi pada jurusan pendidikan sejarah penulis juga merupakan calon guru atau pendidik yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan guru dari masa ke masa. Penulis berasumsi tidak ada pihak yang harus lebih peduli memperhatikan dinamika perkembangan guru selain guru itu sendiri. Diharapkan dari penelitian ini, berbagai *stakeholder* pendidikan khususnya guru itu sendiri memiliki kepedulian yang lebih terhadap profesi guru. Sehingga pada akhirnya bisa ditemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru dan tentunya demi meningkatkan kualitas profesionalisme guru.

FGII merupakan sebuah organisasi guru independen yang bergerak dalam tataran Nasional dan memiliki cabang di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu perlu ditentukan objek kajian yang akan diteliti oleh peneliti agar lebih terfokus. Peneliti memfokuskan kajian pada FGII yang berada di wilayah Kota Bandung dan Jakarta. Alasan pemilihan kedua kota tersebut adalah sebagai wilayah pusat gerakan yang dilakukan oleh FGII. Selain itu Bandung dan Jakarta

menjadi tempat munculnya ide awal pembentukan FGII dan pusat koordinasi pada cabang organisasi di seluruh Indonesia.

Adapun alasan penulis memilih tahun 1998-2008 sebagai batasan kajian penelitian, didasarkan pada beberapa aspek. Tahun 1998 Indonesia mulai memasuki era Reformasi yang membawa warna baru, pada era ini kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpendapat muncul dan menjadi jalan bagi guru-guru di daerah membentuk organisasi guru diluar organisasi besar yang sudah ada sebelumnya. Tahun 1999 menjadi momentum awal munculnya Lembaga Advokasi Pendidikan (LAP) yang menjadi cikal bakal salah satu pendiri FGII. Selanjutnya tahun 2008 berakhirnya kepengurusan FGII periode kedua, menjadi momentum penting dalam pencapaian keberhasilan-keberhasilan gerakan yang telah dilakukan FGII. Keberhasilan tersebut berupa advokasi pendidikan, pemerhati kebijakan pemerintah, peningkatan profesionalisme guru, dan salah satu keberhasilan penting lainnya adalah peran serta FGII dalam penyusunan UU Guru dan Dosen No.20 tahun 2005 beserta pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan UU tersebut. Peran serta tersebut tercantum dalam naskah “Kronologis Penyusunan UU Guru Republik Indonesia” (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2003: 1-3).

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merasa berkepentingan untuk melakukan suatu penelitian berkaitan dengan pembentukan FGII sebagai salah satu dinamika gerakan organisasi guru di Indonesia pada era reformasi. Kemunculan FGII sebagai organisasi guru diluar organisasi yang telah ada sebelumnya menimbulkan ketertarikan penulis untuk

mengkaji dinamika beserta permasalahan-permasalahan yang ada dalam sebuah rumusan judul penelitian “*Federasi Guru Independen Indonesia : Sebuah Dinamika Gerakan Organisasi Guru pada Era Reformasi Tahun 1998-2008*”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, masalah utama yang akan dikaji adalah “*Bagaimana Dinamika Gerakan Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Sebagai Organisasi Guru pada Era Reformasi Tahun 1998-2008?*”. Agar pembahasan lebih terfokus maka penulis membatasi pokok bahasan dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang dibentuknya organisasi Federasi Guru Independen Indonesia?
2. Bagaimana perkembangan organisasi Federasi Guru Independen Indonesia pada tahun 1998-2008?
3. Bagaimana peranan organisasi Federasi Guru Independen Indonesia dalam memperjuangkan nasib guru tahun 1998-2008?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pokok pemikiran diatas, menjawab dan memecahkan rumusan masalah yang ada merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh penulis. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dinamika gerakan FGII sebagai sebuah organisasi guru pada era reformasi. Selain itu penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan latar belakang dibentuknya organisasi Federasi Guru Independen Indonesia (FGII). Pembahasannya meliputi kebijakan pendidikan orde baru, organisasi guru pada masa orde baru, momentum reformasi 1998 dan kebebasan berdemokrasi, serta kebijakan pendidikan pada era reformasi.
2. Menguraikan perkembangan organisasi FGII pada tahun 1998-2008 meliputi kemunculan organisasi guru di berbagai daerah, proses deklarasi FGII, struktur organisasi FGII berupa mekanisme pembagian kerja dan jumlah anggota FGII, serta AD/ART dan program kerja FGII yang dicanangkan dalam tiap kongres.
3. Menjelaskan peranan FGII 1998-2008 meliputi perlindungan hukum anggota, pemerhati kebijakan pendidikan, peningkatan profesionalisme guru, serta dibahas pula mengenai peranan FGII dalam penyusunan UU Guru dan Dosen.

Penelitian mengenai “*Pembentukan Federasi Guru Independen Indonesia : Sebuah Dinamika Gerakan Organisasi Guru Pada Era Reformasi Tahun 1998-2008*” ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Bagi penulis, dapat menghasilkan sebuah karya ilmiah sebagai aplikasi teori yang didapat selama perkuliahan untuk menarik sebuah kesimpulan dari permasalahan yang ditemukan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dan ilmiah dalam kehidupan praktis. Selain itu sebagai seorang calon guru jurusan pendidikan sejarah, penulis memiliki kepedulian terhadap sejarah perkembangan guru pada era reformasi karena tidak ada lagi yang harus peduli terhadap sejarah perkembangan guru selain guru itu sendiri.
2. Bagi UPI khususnya bagi jurusan Pendidikan sejarah, memperkaya penulisan sejarah keorganisasian khususnya organisasi profesi guru. Selanjutnya karya

ilmiah ini bisa dijadikan sumber rujukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya di Jurusan Pendidikan Sejarah UPI.

3. Bagi organisasi FGII khususnya bagi tokoh-tokoh dan anggota secara keseluruhan menjadi salah satu masukan untuk meningkatkan konsistensi kinerja mereka sebagai organisasi independen yang mewadahi aspirasi guru.
4. Bagi pemerintah dijadikan bahan masukan mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru dan organisasi profesi, sehingga karya ilmiah ini bisa menjadi bahan istropeksi pemerintah khususnya kebijakan mengenai guru.
5. Bagi institusi pendidikan diharapkan penelitian ini menjadi sumber referensi dalam perkembangan sejarah pendidikan di Indonesia. Guru sebagai *stakeholder* pendidikan berperan penting, termasuk didalamnya perkembangan organisasi profesi yang menauginya menjadi bagian penting dalam menjelaskan dinamika sejarah pendidikan di Indonesia.
6. Manfaat paling nyata dari penulisan karya ilmiah ini diharapkan bisa menjadi bacaan masyarakat umum dengan menyusunnya menjadi sebuah buku. Tentunya penyusunan karya ilmiah ini menjadi sebuah buku atas dukungan organisasi FGII dan juga dosen jurusan pendidikan sejarah

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Hasil yang diperoleh melalui observasi, telaah pustaka, dan wawancara dikumpulkan kemudian disusun kedalam sebuah laporan dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I, Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan, dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang di dalamnya memuat penjelasan mengapa masalah yang diteliti timbul dan penting untuk dikaji, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka dan Landasan Teoretis. Bab ini berisi tentang berbagai pendapat bersumber pada literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu mengenai “Federasi Guru Independen Indonesia: Sebuah Dinamika Gerakan Organisasi Guru pada Era Reformasi Tahun 1998-2008”.

BAB III, Metodologi Penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang metode dan teknik penelitian yang digunakan penulis dalam mencari sumber-sumber dan cara pengolahan sumber yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji.

BAB IV, Federasi Guru Independen Indonesia Sebagai Gerakan Organisasi Guru pada Era Reformasi. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan seluruh hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Uraian tersebut berdasarkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan pada bab pertama.

BAB V, Kesimpulan. Pada bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan deskripsi dan beberapa saran yang bermanfaat bagi beberapa pihak yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang dibahas.